



**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)  
SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya, aparatur Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang diberikan pengetahuan dan kemampuan untuk mengemban dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) tahun 2021. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2021 menguraikan program, rencana kegiatan dan sasaran tahunan berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dalam rangka mencapai visi, misi dan sasaran.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2021 merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and good governance*) serta berorientasi kepada hasil (*result oriented*) sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2021 ini pada dasarnya merupakan representasi tugas pokok dan fungsi OPD. Berkenaan dengan itu, sebagaimana konsep manajemen pemerintahan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta profesional dalam hal perencanaan kinerja dan penganggaran. Dalam aplikasinya, penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang ini merupakan wujud pertanggungjawaban dan pengejawantahan semangat reformasi birokrasi yang menghendaki pencapaian maksimal dalam etos kerja.

Akhir kata, semoga dokumen Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2021 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kinerja dan diharapkan mampu memberikan manfaat serta dampak positif bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara informasi, evaluasi maupun sebagai parameter dalam peningkatan kinerja organisasi.

Pangkalpinang, Agustus 2021

**SEKRETARIS DPRD KOTA PANGKALPINANG,**

**Drs. AKHMAD ELVIAN**

**NIP 196510141989031004**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana perubahan tahunan, Rencana Kerja perubahan ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung tujuan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang mengingat bahwa :

- a. Rencana Kerja Perubahan merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari visi, misi, dan program PD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perubahan.
- b. Rencana Kerja Perubahan merupakan acuan PD untuk memasukkan program kegiatan serta pagu anggaran kedalam aplikasi e planning RKPD perubahan dan KUA PPAS serta sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perubahan tahun 2020.
- c. Rencana Kerja Perubahan merupakan salah satu instrumen untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2020 yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian dan realisasi kinerja Perangkat Daerah serta capaian dan realisasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang telah tercapai.

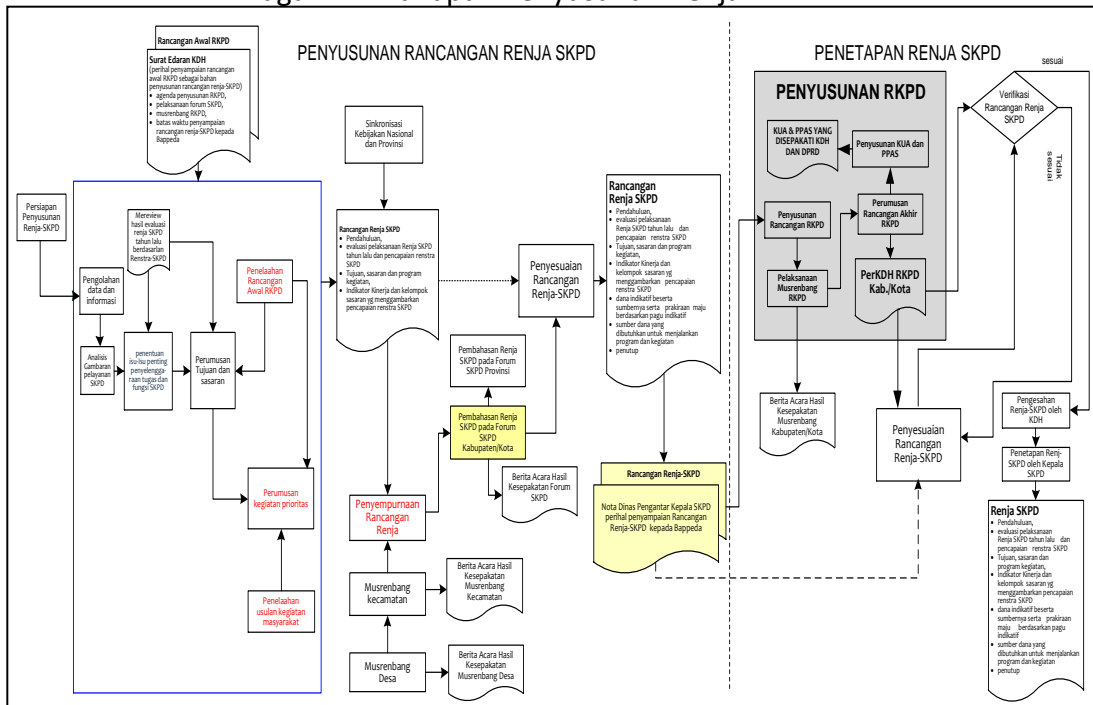
Penyusunan RENJA Perubahan berpedoman pada Renstra Perubahan dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Perubahan. Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD Perubahan, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Perubahan Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA). Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang

pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja (RENJA) Perubahan.

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1  
Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja



**1.2 Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2021, yaitu :

- 1) Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
  - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
  - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  - 17) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

- Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  - 20) Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
  - 21) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
  - 22) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
  - 23) Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
  - 24) Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
  - 25) Peraturan Daerah No 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8)
  - 26) Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.



### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2021.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Perubahan, yaitu:

#### BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

#### BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Triwulan II, analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2021

Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan.

#### BAB IV Penutup

Menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

**BAB II****Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang**

Tujuan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program / kegiatan adalah menginterpretasikan sejauh mana kemampuan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi target kinerja program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hingga tahun 2020, Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang telah melaksanakan berbagai program / kegiatan yang menjadi wewenangnya dalam satu urusan wajib yaitu urusan wajib pemerintahan fungsi penunjang administrasi.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2006-2026 dalam Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Kedua. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Adapun Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 dilaksanakan 2 (Dua) program dengan 14 (Empat Belas) kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) Sub Kegiatan prioritas. Adapun kegiatan prioritas yang dilaksanakan di tahun 2021 tertuang di tabel 2.1.1. sebagai berikut :

**Tabel 2.1.1**

KODE					URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
4	2				SEKRETARIAT DPRD
4	02	01			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA / PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4	02	01	2.02	05	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
4	02	01	2.02	07	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
4	02	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4	02	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4	02	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
4	02	01	2.06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel
4	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4	2	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.15</b>		<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check up
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.16</b>		<b>Layanan Administrasi DPRD</b>
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD / Pendalaman Tugas DPRD
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.05</b>		<b>Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat</b>
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan reses
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.07</b>		<b>Pembahasan Kerjasama Daerah</b>
4	02	2	2.07	02	penyusunan bahan komunikasi dan publikasi

4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD
4	02	02	2.08	01	koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD
4	02	02	2.08	02	penyusunan laporan kinerja DPRD

Hasil dari pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan ukuran terhadap pelaksanaan Renja tahun 2021 dan pencapaian kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang dituangkan dalam bentuk matrik sebagaimana tabel 2.1.2 berikut :

**Tabel. 2.1.2**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA**  
**SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG**  
**TRIWULAN II TAHUN 2021**

No	Sasaran	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2023 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi i Capaian Kinerja Renstra Perangkat at Daerah sampai dengan Renja Perangkat at Daerah Tahun Lalu (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 s/d tahun 2023 (akhir Tahun pelaksanaan Renja PD tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab					
								Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		I							II		III		IV
1	2	3	4	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	15	
		SEKRETARIAT DPRD																			
										80		80		80							SETWAN
	Terpenuhi a jumlah produk hukum yang dihasilkan									100		100		100							SETWAN

# RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG

## 2021

	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA / PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA		82.589.384			24.632.038.193		4.265.910.005		6.718.023.965				10.983.933.970					SETWAN	
	Terpenuhinya penyampaian laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah tepat waktu	300	24.751.697.661		100	8.047.585.780	-	1.378.047.081	-	0	0	0,00	1.378.047.081	0%	0,17	-	1.378.047.081	-	0,06	SETWAN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300	30.998.900		100	10.998.900	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36	15.499.900		4	5.499.900	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27	15.499.000		3	5.499.000	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)													-	-					
	Predikat Kinerja																			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	24.720.698.761		100	8.036.586.880	-	1.378.047.081	-	3.495.368.450	0	0	0	4.873.415.531	-	696.202.219				SETWAN
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1260	24.683.700.261		420	8.025.588.380	105	1.378.047.081	105	3.495.368.450	0	0	210,0	4.873.415.531	30,0	696.202.219				SETWAN
	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3	15.499.000		1	5.499.500	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	3	15.499.500		1	5.499.000	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD  
KOTA PANGKALPINANG

2021

	penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Terlaksananya penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran SKPD	2	6.000.000															SETWAN		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															30,0	696.202,219					
Predikat Kinerja																					
	Terwujudnya ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi		300	415.000.000		100	135.000.000	-	-	29.714.200	0	0	0,00	29.714.200	0%	0,22	-	29.714.200	-	0,07	SETWAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah		300	415.000.000		100	135.000.000	-	-	29.714.200	0	0	-	29.714.200	-	4.244.886				SETWAN	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya untuk ASN		300	130.000.000									-	-	-	-				SETWAN	
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya		60	285.000.000		20	135.000.000	-	4	29.714.200	0	0	4,00	29.714.200	0,57	4.244.886				SETWAN	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															0,57	4.244.886					
Predikat Kinerja																					
	Terpenuhiya kebutuhan administrasi perkantoran perangkat daerah		100	2.997.874.736		100	1.127.195.630	-	-	194.543.185	0	0	0,00	194.543.185	0%	0,17	-	194.543.185	-	0,06	SETWAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100	2.997.874.736		100	1.127.195.630	-	-	194.543.185	0	0	-	194.543.185	-	27.791.884				SETWAN	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		45	77.480.569		15	24.577.500	-	5	11.830.000	0	0	5,00	11.830.000	0,71	1.690.000				SETWAN	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		105	679.914.004		35	282.884.880	-	-		0	0	-	-	-	-				SETWAN	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga		6	554.711.000		6	197.420.000	-	2	480.000	0	0	2,00	480.000	0,29	68.571				SETWAN	

# RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG

## 2021

	Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	2	876.684.863		2	354.467.250	-	1	83.999.000	0	0	1,00	83.999.000	0,14	11.999.857					SETWAN	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan	45	372.732.000		15	133.040.000	-	4	40.684.000	0	0	4,00	40.684.000	0,57	5.812.000					SETWAN	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2	73.472.165		2	23.306.000	-	1	4.050.000	0	0	1,00	4.050.000	0,14	578.571					SETWAN	
	Fasilitasi kunjungan tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	3000	51.250.000			-						-	-	-	-					SETWAN	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	328.575.000		20	111.500.000	-	8	53.500.185	0	0	8,00	53.500.185	1,14	7.642.884					SETWAN	
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	6	56.000.000									-	-	-	-					SETWAN	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															3,00	27.791.884						
Predikat Kinerja																						
	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100	54.424.811.849		100	15.322.256.783	-	2.887.862.924	-	6.493.766.580	0	0	0,00	9.381.629.504	0%	0,61	-	9.381.629.504	-	0,17	SETWAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	1.581.845.754		100	551.735.000	-	-	-	0	0	-	-	-	-					SETWAN	
	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan mebel untuk menunjang urusan pemerintah daerah	25	475.436.373		10	271.735.000	-	-		0	0	-	-	-	-					SETWAN	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	42	398.659.381									-	-	-	-					SETWAN	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya untuk menunjang urusan pemerintah daerah	6	379.000.000		2	280.000.000	-	-		0	0	-	-	-	-					SETWAN	



# RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG

## 2021

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya	6	153.750.000		0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-				SETWAN
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya	4	175.000.000		0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-				SETWAN
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															-	-				
Predikat Kinerja																				
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>2.807.653.293</b>		<b>100</b>	<b>842.371.080</b>	<b>-</b>	<b>113.467.293</b>	<b>-</b>	<b>308.445.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>421.912.697</b>	<b>-</b>	<b>60.273.242</b>			SETWAN
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	10100	47.125.000			-							-	-	-				SETWAN
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	170	766.057.500		170	258.000.000	30	45.162.293	40	96.704.904	0	0	70,00	141.867.197	10,0	20.266.742			SETWAN
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100	394.062.500		100	64.700.000	-		30	15.785.000	0	0	30,00	15.785.000	4,29	2.255.000			SETWAN
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	20	1.600.408.293		20	519.671.080	2	68.305.000	5	195.955.500	0	0	7,00	264.260.500	1,00	37.751.500			SETWAN
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															15,3	60.273.242				
Predikat Kinerja																				
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>2.668.670.068</b>		<b>100</b>	<b>995.984.500</b>	<b>-</b>	<b>32.342.087</b>	<b>-</b>	<b>140.318.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>172.660.929</b>	<b>-</b>	<b>24.665.847</b>			SETWAN
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	3	150.000.000			-							-	-	-				SETWAN

# RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG

## 2021

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36	1.386.263.068		12	614.734.500	1	32.342.087	4	132.919.842	0	0	5,00	165.261.929	0,71	23.608.847			SETWAN
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	6	151.157.000			-							-	-	-	-			SETWAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	8	781.250.000		4	381.250.000	-		1	7.399.000	0	0	1,00	7.399.000	0,14	1.057.000			SETWAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	250.000.000			-							-	-	-	-			SETWAN
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																0,86	24.665.847			
Predikat Kinerja																				
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100	46.579.092.733		100	12.664.616.203	-	2.742.053.544	-	6.045.002.334	0	0	-	8.787.055.878	-	1.255.293.697			SETWAN
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	30	45.060.217.733		360	11.747.116.203	90	2.742.053.544	90	6.045.002.334	0	0	180	8.787.055.878	25,7	1.255.293.697			SETWAN
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	360	668.875.000		120	277.500.000	-		-		0	0	-	-	-	-			SETWAN
	Pelaksanaan Medical Check up	Terlaksananya medical check up bagi anggota DPRD	90	850.000.000		30	640.000.000	-		-		0	0	-	-	-	-			SETWAN
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																25,7	1.255.293.697			
Predikat Kinerja																				
	Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya layanan administrasi DPRD	100	787.550.000		100	267.550.000	-		-		0	0	-	-	-	-			SETWAN
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Terlaksananya fasilitasi fraksi DPRD	4	20.000.000			-							-	-	-	-			SETWAN

## RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG

# 2021

Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	9	767.550.000		3	267.550.000	-	-	0	0	-	-	-	-	-				SETWAN	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														-	-					
Predikat Kinerja																				
<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>			85.565.945.495			28.015.698.531	-	1.434.442.121	7.528.130.486				8.962.572.607	-	1.280.367.515				SETWAN	
	Terlaksananya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100	85.565.945.495		100	28.015.698.531	-	1.434.442.121	7.528.130.486	0	0	0,00	8.962.572.607	0%	0,32	-	8.962.572.607	-	0,10	SETWAN
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	100	19.635.021.747		100	6.295.475.500	-	-	1.168.872.172	0	0	-	1.168.872.172	-	166.981.739				SETWAN	
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	36	30.000.000		12	171.975.500	-	-		0	0	-	-	-	-				SETWAN	
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah dan pembahasan peraturan daerah inisiatif DPRD	72	19.352.521.747		24	6.123.500.000	-	3	1.168.872.172	0	0	3,00	1.168.872.172	0,43	166.981.739				SETWAN	
Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan	Terlaksananya penyelenggaraan kajian perundang-undangan	2	100.000.000			-							-	-	-				SETWAN	
Fasilitasi Penyusunan penjelasan/ keterangan naskah akademik	Terlaksananya fasilitasi penyusunan penjelasan/ keterangan naskah akademik	9	152.500.000			-							-	-	-				SETWAN	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														0,43	166.981.739					
Predikat Kinerja																				
Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD	100	16.863.218.819		100	5.683.113.881	-	119.050.000	1.164.642.980	0	0	-	1.283.692.980	-	183.384.711				SETWAN	
Bimbingan Teknis DPRD / Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya pendalaman tugas DPRD	18	11.703.213.881		6	4.203.213.881	-	3	557.517.980	0	0	3,00	557.517.980	0,43	79.645.426				SETWAN	







### BAB III

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Rencana Kerja Sekretariat DPRD

Rencana kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang. Sesuai dengan tugas pokoknya sebagai OPD yang melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka disusun visi dan misi Sekretariat DPRD yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Visi Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang adalah :

**“Terwujudnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang sebagai Penghasil Peraturan Daerah yang berkualitas dalam mendukung terwujudnya Pangkalpinang sebagai Kota Inventasi dan Berwawasan Lingkungan”.**

Penjelasan mengenai Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD berikut dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat dari tabel 3.1.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1**

<p><b>Visi : “Mewujudkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang sebagai Penghasil Peraturan Daerah yang Berkualitas dalam Mendukung Terwujudnya Pangkalpinang sebagai Kota Investasi dan Berwawasan Lingkungan”</b></p>			
<p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Meningkatnya keterampilan, pengetahuan, wawasan dan kinerja pegawai Sekretariat DPRD sesuai bidangnya masing-masing.</b></li> <li><b>2. Meningkatnya penyediaan fasilitas pelayanan untuk menunjang kinerja dan kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.</b></li> <li><b>3. Adanya kontribusi yang bermakna bagi penyelenggaraan tugas dan kewenangan DPRD.</b></li> <li><b>4. Terjalannya komunikasi dan koordinasi dalam mediasi dan menyinergikan hubungan antar badan legislatif dan eksekutif daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik.</b></li> </ol>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan / Sasaran</b>	<b>Kebijakan</b>
1. Meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan bidangnya masing-masing.	<i>Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kinerja Dewan</i>	Indikator Tujuan : Indek Kepuasan DPRD	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dengan fokus pada pembangunan WEB DPRD dan sistem E-reses
2. Meningkatkan penyediaan fasilitas pelayanan secara bertahap untuk menunjang tugas, fungsi, wewenang dan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	<i>Meningkatnya kualitas penetapan Perda sesuai standar</i>	<i>a. Ketersediaan informasi dalam menyebarluaskan kinerja Dewan dan menyerap aspirasi masyarakat.</i>	Peningkatan kualitas penetapan Perda dengan fokus pada koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Dewan
		<i>b. persentase raperda yang ditetapkan menjadi perda tepat waktu</i>	



		<i>c. Persentase aparatur yang memiliki standar kompetensi.</i>	
3. Memfasilitasi penyelenggaraan tugas, fungsi, wewenang dan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	<i>Tingkat kinerja aparatur Setwan yang memiliki kompetensi dan kapasitas</i>	<i>a. Persentase propemperda yang dibahas</i>	Peningkatan kinerja Sekretariat Dewan dengan fokus pada peningkatan kapasitas khusus sesuai dengan kebutuhan pelayanan Dewan
		<i>b. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam APBD</i>	
		<i>c. Persentase aduan masyarakat yang terakomodir dalam tindak lanjut</i>	
4. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam memediasi dan mensinergikan hubungan antara legislatif, eksekutif daerah serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik	<i>Meningkatnya komunikasi dan koordinasi dalam memediasi dan mensinergikan hubungan antara legislatif, eksekutif daerah serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik</i>	<i>Persentase rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan dalam 1 Tahun</i>	

### **3.2 Program dan Kegiatan**

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2006-2026 dalam Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Kedua. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Adapun Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 terlampir dalam Tabel 3.2.1 di bawah ini.

Tabel. 3.2.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA  
SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG 2021

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	*Indikator Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Tahun 2022			Keterangan			
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)				
					Sebelum Perubahan*	Setelah Perubahan	bertambah/ (berkurang)							
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9	10	11	12			
4	02	01	x	x	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA / PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTAPROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA / PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp 24.632.038.193	Rp 27.520.077.280	Rp 2.888.039.087		Rp 29.632.595.970		
					Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu		100%	Rp 8.047.585.780	Rp 8.132.046.580	Rp 84.460.800		100%	Rp 8.249.228.090	
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	Rp 10.998.900	Rp 10.998.900	Rp -		100%	Rp 10.000.000	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Rp 5.499.900	Rp 5.499.900	Rp -	APBD	4 Dokumen	Rp 5.000.000	
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Rp 5.499.000	Rp 5.499.000	Rp -	APBD	3 dokumen	Rp 5.000.000	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	Rp 8.036.586.880	Rp 8.121.047.680	Rp 84.460.800		100%	Rp 8.239.228.090	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Rp 8.025.588.380	Rp 8.110.049.180	Rp 84.460.800	APBD	35 orang	Rp 8.226.228.090	
4	02	01	2.02	05	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD			Rp 5.499.500	Rp 5.499.500	Rp -	APBD	1 dokumen	Rp 5.000.000	
4	02	01	2.02	07	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD			Rp 5.499.000	Rp 5.499.000	Rp -	APBD	1 laporan	Rp 5.000.000	
4	02	01	2.02	08	penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran			Rp -	Rp -		APBD	1 laporan	Rp 3.000.000	

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD  
KOTA PANGKALPINANG

2021

					Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada unit kerja	100%	Rp 135.000.000	Rp 100.000.000	Rp (35.000.000)		100%	Rp 180.000.000		
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	100%	Rp 135.000.000	Rp 100.000.000	Rp (35.000.000)		100%	Rp 180.000.000	
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas ASN yang di adakan	0	Rp -			APBD	150 stel	Rp 80.000.000	
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	20 orang	Rp 135.000.000	Rp 100.000.000	Rp (35.000.000)	APBD	20 orang	Rp 100.000.000	
					Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100%	Rp 1.127.195.630	Rp 605.508.917	Rp (521.686.713)		100%	Rp 1.228.582.412	
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya administrasi Umum	100%	Rp 1.127.195.630	Rp 605.508.917	Rp (521.686.713)		100%	Rp 1.228.582.412	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 jenis	Rp 24.577.500	Rp 24.577.500	Rp -	APBD	15 jenis	Rp 25.806.375	
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	35 unit/jenis	Rp 282.884.880	Rp -	Rp (282.884.880)	APBD	35 unit/jenis	Rp 297.029.124	
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	6 unit/jenis	Rp 197.420.000	Rp 14.420.000	Rp (183.000.000)	APBD	6 unit/jenis	Rp 207.291.000	
4	02	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	2 jenis	Rp 354.467.250	Rp 317.942.617	Rp (36.524.633)	APBD	2 jenis	Rp 372.217.613	
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	15 unit/set	Rp 133.040.000	Rp 133.040.000	Rp -	APBD	15 unit/set	Rp 139.692.000	
4	02	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 buku/koran	Rp 23.306.000	Rp 23.306.000	Rp -	APBD	2 buku/koran	Rp 24.471.300	
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	jumlah tamu yang berkunjung	0	Rp -	Rp -	Rp -	APBD	1500 orang	Rp 25.000.000	
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilakukan	20 kali	Rp 111.500.000	Rp 77.222.800	Rp (34.277.200)	APBD	20 kali	Rp 117.075.000	
4	02	01	2.06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	jumlah website/ aplikasi yang dikelola	2 kali	Rp -	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	APBD	2 kali	Rp 20.000.000	
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100%	Rp 15.322.256.783	Rp 18.682.521.783	Rp 3.360.265.000		100%	Rp 19.974.785.468	
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Rp 551.735.000	Rp -	Rp (551.735.000)		100%	Rp 677.360.754	

# RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG

# 2021

4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	7 unit/set	Rp 271.735.000	Rp -	Rp (271.735.000)	APBD	7 unit/set	Rp 178.701.373
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	0	Rp -	Rp -	Rp -	APBD	15 unit/set	Rp 173.659.381
4	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan	2 unit	Rp 280.000.000	Rp -	Rp (280.000.000)	APBD	2 unit	Rp 150.000.000
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan	0	Rp -	Rp -	Rp -	APBD	3 unit/set/kwh	Rp 75.000.000
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan	0	Rp -	Rp -	Rp -	APBD	2 unit/set	Rp 100.000.000
4	02	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 842.371.080</b>	<b>Rp 842.371.080</b>	<b>Rp -</b>		<b>100%</b>	<b>Rp 942.244.134</b>
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	0	Rp -	Rp -	Rp -	APBD	5000 Surat	Rp 22.500.000
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	170 orang	Rp 258.000.000	Rp 258.000.000	Rp -	APBD	170 orang	Rp 255.150.000
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	100 unit/set	Rp 64.700.000	Rp 64.700.000	Rp -	APBD	100 unit/set	Rp 131.250.000
4	2	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	20 jenis	Rp 519.671.080	Rp 519.671.080	Rp -	APBD	20 jenis	Rp 533.344.134
4	02	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 995.984.500</b>	<b>Rp 707.984.500</b>	<b>Rp (288.000.000)</b>		<b>100%</b>	<b>Rp 1.002.891.244</b>
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	0	Rp -	Rp -	Rp -	APBD	1 unit	Rp 50.000.000
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	12 unit	Rp 614.734.500	Rp 614.734.500	Rp -	APBD	12 unit	Rp 461.721.244
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	0	Rp -	Rp -	Rp -	APBD	2 unit	Rp 41.170.000
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	4 unit	Rp 381.250.000	Rp 93.250.000	Rp (288.000.000)	APBD	2 unit	Rp 300.000.000
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	0	Rp -	Rp -	Rp -	APBD	2 unit/set	Rp 150.000.000

# RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG

# 2021

4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	persentase terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD		100%	Rp 12.664.616.203	Rp 16.864.616.203	Rp 4.200.000.000		100%	Rp 17.092.289.336
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang dibayarkan gaji dan tunjangannya		30 orang	Rp 11.747.116.203	Rp 16.647.116.203	Rp 4.900.000.000	APBD	30 orang	Rp 16.450.914.336
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian yang disediakan		120 stel	Rp 277.500.000	Rp 217.500.000	Rp (60.000.000)	APBD	120 stel	Rp 241.375.000
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check up	Terlaksananya Medical Check Up		30 orang	Rp 640.000.000	Rp -	Rp (640.000.000)	APBD	30 orang	Rp 400.000.000
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	persentase terpenuhinya layanan Administrasi DPRD		100%	Rp 267.550.000	Rp 267.550.000	Rp -		100%	Rp 260.000.000
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Terlaksananya fasilitasi fraksi		0	Rp -	Rp -	Rp -	APBD	2 jenis	Rp 10.000.000
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang dilaksanakan		3 kali	Rp 267.550.000	Rp 267.550.000	Rp -	APBD	3 kali	Rp 250.000.000
4	02	02	x	x	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				Rp 28.015.698.531	Rp 19.590.649.375	Rp (8.425.049.156)			Rp 29.015.140.030
						persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD		100%	Rp 28.015.698.531	Rp 19.590.649.375	Rp (8.425.049.156)		100%	Rp 29.015.140.030
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	persentase jumlah perda dan peraturan DPRD yang disahkan		100%	Rp 6.295.475.500	Rp 3.945.475.500	Rp (2.350.000.000)		100%	Rp 6.562.862.300
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	terlaksananya penyusunan dan pembahasan propemperda		12 kali	Rp 171.975.500	Rp 21.975.500	Rp (150.000.000)	APBD	12 kali	Rp 10.000.000
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang disahkan dan pembahasan Peraturan daerah inisiatif DPRD yang dibahas		24 perda	Rp 6.123.500.000	Rp 3.923.500.000	Rp (2.200.000.000)	APBD	24 perda	Rp 6.452.862.300
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan	jumlah kajian Perundang-undangan		0	Rp -	Rp -	Rp -	APBD	1 dokumen	Rp 50.000.000
4	03	03	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan penjelasan/ keterangan naskah akademik	Jumlah Naskah Akademis			Rp -	Rp -	Rp -	APBD	3 dokumen	Rp 50.000.000
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	persentase peningkatan kapasitas DPRD		100%	Rp 5.683.113.881	Rp 4.279.863.875	Rp (1.403.250.006)		100%	Rp 5.817.397.500
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD / Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Pendalaman Tugas DPRD yang diikuti		6 kali	Rp 4.203.213.881	Rp 2.659.963.875	Rp (1.543.250.006)	APBD	6 kali	Rp 4.000.000.000
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tersedianya Dokumentasi DPRD		0	Rp -	Rp -	Rp -	APBD	2 Jenis	Rp 5.000.000
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli		10 orang	Rp -	Rp 420.000.000	Rp 420.000.000	APBD	10 orang	Rp 600.000.000
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga ahli Fraksi		40 orang	Rp 1.479.900.000	Rp 1.199.900.000	Rp (280.000.000)	APBD	40 orang	Rp 1.212.397.500
4	02	02	2.05		Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat		100%	Rp 130.560.000	Rp 130.560.000	Rp -		100%	Rp 142.088.000

# RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG

# 2021

4	02	02	2.05	02	Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	jumlah pokir DPRD yang ditindaklanjuti	0	Rp -	Rp -	Rp -	APBD	1 dokumen	Rp 5.000.000
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan reses	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan	3 kali	Rp 130.560.000	Rp 130.560.000	Rp -	APBD	3 kali	Rp 137.088.000
4	02	02	2.07		<b>Pembahasan Kerjasama Daerah</b>	<b>persentase Pembahasan kerjasama daerah yang dilakukan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.052.600.000</b>	<b>Rp 1.052.600.000</b>	<b>Rp -</b>		<b>100%</b>	<b>Rp 1.691.940.000</b>
4	02	2	2.07	02	penyusunan bahan komunikasi dan publikasi	Jumlah jenis jasa mass media yang digunakan	3 jenis	Rp 1.052.600.000	Rp 1.052.600.000	Rp -	APBD	3 jenis	Rp 1.691.940.000
4	02	02	2.08		<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>persentase fasilitasi tugas DPRD yang dilakukan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 14.853.949.150</b>	<b>Rp 10.182.150.000</b>	<b>Rp (4.671.799.150)</b>		<b>100%</b>	<b>Rp 14.800.852.230</b>
4	02	02	2.08	01	koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah Rapat rapat konsultasi keluar daerah yang diikuti	60 kali	Rp 14.221.849.150	Rp 9.540.000.000	Rp (4.681.849.150)	APBD	60 kali	Rp 14.167.702.230
4	02	02	2.08	02	penyusunan laporan kinerja DPRD	jumlah jenis laporan alat kelengkapan DPRD	1 laporan	Rp 632.100.000	Rp 642.150.000	Rp 10.050.000	PAD	1 laporan	Rp 633.150.000
								<b>Rp 52.647.736.724</b>	<b>Rp 47.110.726.655</b>	<b>Rp (5.537.010.069)</b>			<b>Rp 58.647.736.000</b>

## BAB IV

### PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat dari program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen renstra. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2021 memuat langkah-langkah untuk mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Kota Pangkalpinang. Untuk menjaga kesinambungan program kerja, Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang disusun dalam kerangka pembangunan jangka menengah dengan mencermati pencapaian pada tahun 2021. Dalam penyusunannya, Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2021 mempertimbangkan berbagai permasalahan dan tantangan lingkup tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang. Secara garis besar, perubahan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2020 memuat **2** (Dua) program dan **14** (Empat Belas) kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) Sub Kegiatan dengan besaran belanja Langsung sebesar **Rp. 47.110.726.655 (Empat Puluh Tujuh Milyar Seratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)**.

Beberapa hal yang dapat menjadi kendala dalam pencapaian program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2021 lebih pada aspek teknis. Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai dan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai yang kurang profesional menjadi kendala yang cukup serius. Kedepan, diharapkan kelemahan-kelemahan tadi dapat ditanggulangi dan dicarikan solusi terbaik. Pelaksanaan dan penyelenggaraan tupoksi agar dapat terus dibenahi dari waktu ke waktu. Selain itu, koordinasi lebih ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Persoalan kapasitas dan kompetensi SDM setidaknya dapat terus ditingkatkan seiring dinamisasi SDM itu sendiri.

Pangkalpinang,            Agustus 2021  
SEKRETARIS DPRD KOTA PANGKALPINANG,

**Drs. AKHMAD ELVIAN**  
NIP 196510141989031004



# RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG

# 2021

## Lampiran

### RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG 2021

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir RKPA-BELANJA SKPD										
Pemerintah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2021																				
Organisasi : 4.02.0.00.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH																				
REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																				
Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T-1					
				T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)											
				T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																				
4	02				<b>SEKRETARIAT DPRD</b>					51,588,116,844	1,059,619,880	0	0	52,647,736,724	47,068,726,655	42,000,000	0	0	47,110,726,655	(5,537,010,069)
4	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					23,572,418,313	1,059,619,880	0	0	24,632,038,193	27,478,077,280	42,000,000	0	0	27,520,077,280	2,888,039,087
4	02	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					10,998,900	0	0	0	10,998,900	10,998,900	0	0	0	10,998,900	0
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,499,900	0	0	0	5,499,900	5,499,900	0	0	0	5,499,900	0
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,499,000	0	0	0	5,499,000	5,499,000	0	0	0	5,499,000	0
4	02	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					8,036,586,880	0	0	0	8,036,586,880	8,121,047,680	0	0	0	8,121,047,680	84,460,800
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8,025,588,380	0	0	0	8,025,588,380	8,110,049,180	0	0	0	8,110,049,180	84,460,800
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,499,500	0	0	0	5,499,500	5,499,500	0	0	0	5,499,500	0
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,499,000	0	0	0	5,499,000	5,499,000	0	0	0	5,499,000	0
4	02	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					135,000,000	0	0	0	135,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	(35,000,000)
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				135,000,000	0	0	0	135,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	(35,000,000)
4	02	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					619,310,750	507,884,880	0	0	1,127,195,630	563,508,917	42,000,000	0	0	605,508,917	(521,686,713)
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				24,577,500	0	0	0	24,577,500	24,577,500	0	0	0	24,577,500	0
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	282,884,880	0	0	282,884,880	0	0	0	0	0	(282,884,880)
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14,420,000	183,000,000	0	0	197,420,000	14,420,000	0	0	0	14,420,000	(183,000,000)
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				354,467,250	0	0	0	354,467,250	317,942,617	0	0	0	317,942,617	(36,524,633)
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				91,040,000	42,000,000	0	0	133,040,000	91,040,000	42,000,000	0	0	133,040,000	0
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				23,306,000	0	0	0	23,306,000	23,306,000	0	0	0	23,306,000	0
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				111,500,000	0	0	0	111,500,000	77,222,800	0	0	0	77,222,800	(34,277,200)
4	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000
4	02	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					0	551,735,000	0	0	551,735,000	0	0	0	0	0	(551,735,000)
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	271,735,000	0	0	271,735,000	0	0	0	0	0	(271,735,000)
4	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	280,000,000	0	0	280,000,000	0	0	0	0	0	(280,000,000)
4	02	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					842,371,080	0	0	0	842,371,080	842,371,080	0	0	0	842,371,080	0
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				258,000,000	0	0	0	258,000,000	258,000,000	0	0	0	258,000,000	0
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				64,700,000	0	0	0	64,700,000	64,700,000	0	0	0	64,700,000	0
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				519,671,080	0	0	0	519,671,080	519,671,080	0	0	0	519,671,080	0
4	02	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					995,984,500	0	0	0	995,984,500	707,984,500	0	0	0	707,984,500	(288,000,000)

# RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG

# 2021

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1				
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)											
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
4 02 01 2.09 02	Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							614,734,500		0	0	0	614,734,500	614,734,500	0	0	0	614,734,500		0
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							381,250,000		0	0	0	381,250,000	93,250,000	0	0	0	93,250,000	(288.000.000)	
<b>4 02 01 2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>								<b>12,664,616,203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,664,616,203</b>	<b>16,864,616,203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,864,616,203</b>	<b>4.200.000.000</b>	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						11,747,116,203		0	0	0	11,747,116,203	16,647,116,203	0	0	0	16,647,116,203	4.900.000.000	
4 02 01 2.15 02	Penyelesaian Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							277,500,000		0	0	0	277,500,000	217,500,000	0	0	0	217,500,000	(60.000.000)	
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							640,000,000		0	0	0	640,000,000	0	0	0	0	0	(640.000.000)	
<b>4 02 01 2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>								<b>267,550,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267,550,000</b>	<b>267,550,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267,550,000</b>	<b>0</b>	
4 02 01 2.16 03	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							267,550,000		0	0	0	267,550,000	267,550,000	0	0	0	267,550,000	0	
<b>4 02 02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>								<b>28,015,698,531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,015,698,531</b>	<b>19,590,649,375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,590,649,375</b>	<b>(8.425.049.156)</b>	
<b>4 02 02 2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>								<b>6,295,475,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,295,475,500</b>	<b>3,945,475,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,945,475,500</b>	<b>(2.350.000.000)</b>	
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							171,975,500		0	0	0	171,975,500	21,975,500	0	0	0	21,975,500	(150.000.000)	
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							6,123,500,000		0	0	0	6,123,500,000	3,923,500,000	0	0	0	3,923,500,000	(2.200.000.000)	
<b>4 02 02 2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>								<b>5,683,113,881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,683,113,881</b>	<b>4,279,863,875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,279,863,875</b>	<b>(1.403.250.006)</b>	
4 02 02 2.04 01	Orientasi DPRD (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							4,203,213,881		0	0	0	4,203,213,881	836,059,425	0	0	0	836,059,425	(3.367.154.456)	
4 02 02 2.04 02	Bimbingan Teknis DPRD (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							0		0	0	0	0	1,823,904,450	0	0	0	1,823,904,450	1.823.904.450	
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							0		0	0	0	0	420,000,000	0	0	0	420,000,000	420.000.000	
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							1,479,900,000		0	0	0	1,479,900,000	1,199,900,000	0	0	0	1,199,900,000	(280.000.000)	
<b>4 02 02 2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>								<b>130,560,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,560,000</b>	<b>130,560,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,560,000</b>	<b>0</b>	
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							130,560,000		0	0	0	130,560,000	130,560,000	0	0	0	130,560,000	0	
<b>4 02 02 2.07</b>	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>								<b>1,052,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,052,600,000</b>	<b>1,052,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,052,600,000</b>	<b>0</b>	
4 02 02 2.07 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							1,052,600,000		0	0	0	1,052,600,000	1,052,600,000	0	0	0	1,052,600,000	0	
<b>4 02 02 2.08</b>	<b>Fasilitas Tugas DPRD</b>								<b>14,853,949,150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,853,949,150</b>	<b>10,182,150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,182,150,000</b>	<b>(4.671.799.150)</b>	
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							14,221,849,150		0	0	0	14,221,849,150	9,540,000,000	0	0	0	9,540,000,000	(4.681.849.150)	
4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							632,100,000		0	0	0	632,100,000	642,150,000	0	0	0	642,150,000	10.050.000	